

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Diberbagai negara berkembang termasuk Indonesia, masalah kemiskinan menjadi salah satu permasalahan klasik yang sangat besar dan mendasar karena permasalahan ini telah cukup lama ada yang terus menjadi persoalan dari masa ke masa (Susanto & Pangesti, 2019). Permasalahan kemiskinan dipicu oleh adanya keterbatasan atau rendahnya penghasilan penduduk (Ramadhana, 2016). Hal tersebut diakibatkan oleh adanya ketidakmerataan jumlah penghasilan penduduk sehingga menimbulkan kesenjangan antar penduduk. Kemiskinan tidak cuma berhubungan dengan rendahnya taraf penghasilan dan konsumsi, namun juga berkaitan erat terhadap jenjang pendidikan, tingkat kesehatan dan ketidakmampuan penduduk miskin dalam berpartisipasi pada proses pengembangan (Yuniarti, 2010).

Apabila dimaknai secara luas kemiskinan adalah suatu kondisi individu tidak dapat mencukupi keperluan mendasar dalam hidupnya terkait domisili, konsumsi, busana, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan ditandai dengan lambatnya atau tertinggalnya berbagai hal dalam berkembang seperti rendahnya produktivitas sehingga memberikan pengaruh terhadap penghasilan yang diterima, adanya keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan seseorang untuk mengembangkan diri dalam peningkatan kesejahteraan (Putri et al., 2019). Menurut Kuncoro kemiskinan adalah keadaan individu tidak bisa mencukupi keperluan pokok atau memiliki standar hidup rendah berkaitan dengan rendahnya penghasilan, perumahan yang kurang atau tidak memadai, kondisi kesehatan yang buruk, kualitas pelayanan kesehatan yang buruk, rendahnya jenjang pendidikan yang

berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia, serta tingginya angka pengangguran (Kuncoro, 1997) .

**Gambar 1.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2012 – September 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, (data diolah 2024)

Apabila melihat dari grafik diatas diidentifikasi bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia bulan Maret – September 2022 terus mengalami degradasi. Namun pada bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020 dan September 2022 jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia mengalami adanya peningkatan. Menurut BPS, peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin pada periode diatas dipicu oleh kenaikan harga keperluan pokok seiring dengan adanya kenaikan harga BBM. Sementara itu, peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin pada bulan Maret dan September 2020 dipicu adanya pembatasan pergerakan penduduk akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Kemiskinan juga terjadi karena penduduk itu sendiri tidak mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan bisa juga timbul karena kurang optimalnya kebijakan

Pemerintahan dalam memberikan dukungan pengentasan kemiskinan (Haughton dan Shahidur, 2012).

Dalam Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi yang terbagi dalam dua wilayah disebut Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adapun Provinsi dalam wilayah KBI yaitu pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Sedangkan provinsi yang berada dalam wilayah KTI yaitu pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua. Kedua wilayah tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dimana provinsi pada wilayah KBI seringkali memiliki laju pengembangan ekonomi yang lebih cepat disejajarkan dengan provinsi – provinsi di wilayah KTI (Tubaka, 2019). Misalnya, ketersediaan sarana prasarana, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan transportasi di wilayah Indonesia bagian barat jauh lebih baik apabila disejajarkan wilayah Indonesia bagian timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima provinsi di Wilayah Barat Indonesia dan lima provinsi di Wilayah Timur Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Apabila dilihat dari sisi kemiskinan, di kedua wilayah Indonesia bagian timur dan bagian barat persentase kemiskinan sangat bervariasi. Ada provinsi yang angka kemiskinannya rendah, namun juga ada provinsi yang angka kemiskinannya sangat tinggi. Adapun provinsi dengan rata – rata tingkat kemiskinan paling tinggi di KBI adalah Provinsi Aceh (15,43%), Lampung (12,76%), Bengkulu (15,30%), Jawa Tengah (11,84) dan Sumatera Selatan (12,98%). Sedangkan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi KTI antara lain

Provinsi Papua (26,80%), Papua Barat (21,70%), Maluku (21,21%), NTT (17,99%) dan Gorontalo (15,59%).

Dalam menyelesaikan masalah pengembangan primer terkait kemiskinan perlu adanya fungsi pemerintahan. Adapun yang bisa dilaksanakan pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui suatu kebijakan fiskal salah satunya berada dalam alokasi dana Pemerintahan yang dikeluarkan. Alokasi dana Pemerintahan yang telah disepakati untuk dianggarkan dalam proses pengembangan dibagi dalam beberapa fungsi dimana tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 33, penggolongan belanja menurut fungsi meliputi fungsi ekonomi, pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perumahan, pariwisata dan budaya, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Menurut Usman dan Herman dalam (Pasaribu, 2016) menyimpulkan bahwa pengeluaran untuk pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga dan infrastruktur merupakan bagian yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintahan harus mengembangkan prioritas alokasi dana kepada penduduk agar nantinya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial sehingga angka kemiskinan bisa berkurang.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi manusia karena melalui pendidikan bisa membentuk kepribadian seseorang. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerolehan pendidikan, memiliki kemampuan mengembangkan mutu, relevansi dan efektifitas pengelolaan pendidikan sehingga mampu menghadapi tantangan yang relevan dengan adanya transformasi dari kehidupan lokal hingga nasional.

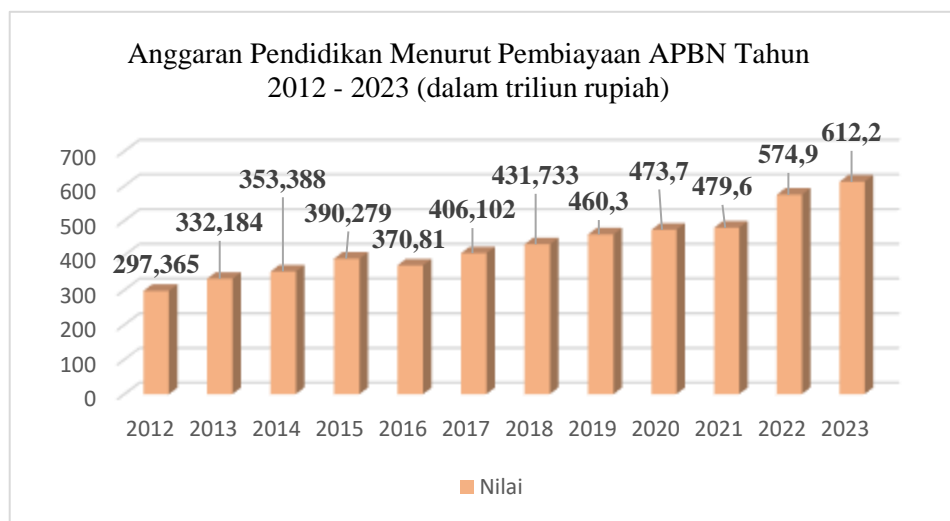
Oleh karena itu, diperlukan reformasi pendidikan yang terencana, tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal ini perlu adanya campur tangan dari pihak Pemerintahan untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu.

Dalam pendidikan untuk bisa mengembangkan kualitas mutu pendidikan salah satunya berkaitan dengan pembiayaan kepentingan pendidikan. Alokasi dana pendidikan telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 menyatakan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara dimana Pemerintahan pusat dan daerah memiliki tanggungjawab dalam menyediakan alokasi dana pendidikan. Kemudian dipertegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistim pendidikan nasional pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan selain gaji tenaga kerja, dana pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% APBN bidang pendidikan dan minimal 20% APBD (Wulandari et al., 2019). Meskipun sudah ada alokasi dana pendidikan dari Pemerintahan akan tetapi masih terdapat biaya lain diperlukan seperti pembelian seragam, buku, alat tulis dan lain sebagainya. Di negara Indonesia, alokasi dana Pemerintahan bidang pendidikan lebih besar ditujukan kepada penduduk kurang mampu baik secara personal maupun melewati suatu kebijakan. Adapaun Pemerintahan mengadakan kebijakan seperti Kebijakan Indonesia Pintar (KIP) sebagai bentuk bantuan sosial bidang pendidikan guna memberi dukungan pendidikan kepada siswa kurang mampu.

Keberhasilan Pemerintahan dalam mengembangkan pendidikan penduduk tercermin dari tingkatan pendidikan yang dicapai masyarakat. Semakin tinggi tingkatan pendidikan yang ditamatkan, maka taraf kesejahteraan penduduk juga semakin meningkat. Apabila taraf kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan maka nantinya jumlah penduduk miskin bisa mengalami penurunan. Dampak

pendidikan terhadap kemiskinan sangat besar karena dengan adanya pendidikan yang layak maka akan memberikan kemampuan dan keterampilan kepada penduduk yang nantinya bisa berkembang. Melalui pendidikan penduduk juga bisa diberikan kesadaran akan pentingnya harkat dan martabat, pengetahuan serta keterampilan yang dibawa ke masa yang akan datang.

**Gambar 1.2. Anggaran Pendidikan Menurut Pembiayaan APBN Tahun 2012 – 2023 (dalam triliun rupiah)**



Sumber : Lembaga Kementerian Keuangan (data diolah, 2024)

Dari grafik diatas, terlihat bahwa Anggaran Penghasilan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia pada sektor pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, alokasi dana pendidikan yang bersumber dari APBN mencapai Rp612,2 triliun. Bujet ini dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk belanja Pemerintahan pusat sebanyak Rp237,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian dipakai untuk kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada 20,1 juta siswa dan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diberikan kepada 994,3 ribu mahasiswa. Disisi lain, tunjangan profesi guru diberikan kepada 553,5 ribu guru non-PNS. Alokasi dana yang disalurkan kepada Pemerintahan daerah mencapai Rp305,6 triliun, yang dipakai untuk Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,7 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD untuk 6,2 juta siswa, dan BOP Pendidikan Kesetaraan diperuntukkan 806 ribu peserta didik. Masih ada alokasi dana sebanyak Rp69,5 triliun dipakai untuk dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan.

Pemerintahan terus mendukung pendidikan di Indonesia agar bisa mengembangkan pendidikan, baik segi kuantitas maupun kualitas. Berada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan haru mengembangkan kualitas pendidikan seperti mutu tenaga pengajar, kurikulum yang kompeten seiring berkembangnya zaman, infrastruktur yang memadai sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Disisi lain, Pemerintahan sudah melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan akses pendidikan seperti kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mencukupi keperluan operasional sekolah tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) agar bisa meringankan biaya pendidikan penduduk sehingga partisipasi sekolah penduduk bisa meningkat.

Alokasi dana pendidikan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 mengenai Rincian Alokasi dana Penghasilan dan Belanja Negara terbagi tiga golongan primer antara lain alokasi dana pendidikan melewati belanja Pemerintahan pusat, alokasi dana pendidikan melewati transfer daerah dan dana desa, serta alokasi dana pendidikan melewati pembiayaan. Alokasi dana pendidikan Pemerintahan pusat dialokasikan untuk belanja pendidikan kementerian dan lembaga. Sementara alokasi dana pendidikan yang ditransfer ke daerah disalurkan melewati berbagai program antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), alokasi profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendidikan. Dana BOS merupakan salah satu sumber primer sekolah untuk mencukupi biaya operasional dan kebijakan Pemerintahan yang mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk mengembangkan akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan yang membutuhkan bantuan dana dari pusat harus mengalokasikan dana dengan melakukan sharing bersama sekolah, komite, atau bahkan daerah, seperti untuk pengembangan ruang kelas, laboratorium, dan gedung baru.”

Pemerintahan perlu melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai kapital dasar dalam pengembangan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut bisa dilaksanakan melalui investasi agar bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif dimana bisa memenuhi keperluan hidupnya sendiri sehingga tidak terjatuh dalam lingkaran kemiskinan. Menurut Mankiw dalam (Bastias, 2010) pengembangan sumber daya manusia bisa dilaksanakan dengan perbaikan kualitas kapital. Perbaikan kualitas kapital bisa dari segi pendidikan dan juga kesehatan yang merupakan tujuan dasar pengembangan di suatu wilayah. Pengeluaran Pemerintahan yang dipergunakan dalam sektor kesehatan berupa penyediaan fasilitas kesehatan dengan memprioritaskan penduduk miskin sebagai prioritas primernya. Dimana nantinya fasilitas – fasilitas yang disediakan tersebut bisa dipergunakan oleh penduduk miskin.

Salah satu fasilitas kesehatan terkait pelayanan kesehatan penduduk adalah puskesmas. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibutuhkan alokasi dana dari Pemerintahan yang cukup dan bisa disalurkan secara adil. Sumber dana puskesmas sendiri berasal dari APBN, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti BPJS Kesehatan. Dana APBD berasal dari Penghasilan Asli Daerah dan dana perimbangan. Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Khusus



dari ABPN, transfer daerah untuk melakukan pembiayaan kegiatan khusus daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri dipakai untuk pengadaan peralatan kesehatan serta sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan penduduk.

**Gambar 1.3. Anggaran Kesehatan Indonesia Tahun 2013 – 2023**



Sumber : Kementerian Keuangan (Data diolah, 2024)

Pada grafik diatas bisa diidentifikasi alokasi dana kesehatan di Indonesia pada tahun 2013 – 2023 mengalami kondisi fluktuatif. Dimana pada tahun 2013 – 2016 alokasi dana yang diberikan Pemerintahan untuk sektor kesehatan terus mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2017, anggaran kesehatan mengalami degradasi Rp593 milyar. Kemudian setelah itu, pada tahun 2018 – 2021 alokasi dana kesehatan terus meningkat dan pada tahun 2021 sendiri alokasi dana kesehatan mengalami peningkatan sangat drastis. Di tahun 2020 alokasi dana kesehatan berada diangka Rp172,3 triliun sedangkan pada tahun 2023 alokasi dana kesehatan sebanyak Rp312,4 triliun rupiah dimana mengalami peningkatan sebanyak Rp140,1 triliun. Adanya peningkatan alokasi dana kesehatan yang sangat drastis tersebut dialokasikan oleh Pemerintahan untuk menangani pandemi Covid-19 agar kondisi kesehatan penduduk Indonesia terus membaik. Setelah itu, pada tahun 2022 – 2023

alokasi dana kesehatan terus mengalami degradasi. Hingga tahun 2023 alokasi dana kesehatan sebanyak Rp169,8 triliun dimana jumlah tersebut mengalami degradasi sebanyak 20,2 persen dari alokasi dana kesehatan pada tahun 2022 sebanyak Rp212,8 triliun.

Alokasi dana kesehatan pada tahun 2023 sebanyak Rp169,8 triliun tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi penanganan lebih lanjut pandemic Covid-19, memperbaiki sistim kesehatan, mempercepat penurunan angka stunting serta kelanjutan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia 2023, pada Selasa (16/8/2022). Namun sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Pemerintahan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk penanganan virus corona Covid-19 dalam alokasi dana kesehatan RAPBN 2013. Dimana disampaikan bahwa alokasi dana kesehatan tidak lagi mempunyai alokasi khusus untuk penanganan pandemi, tetapi anggaran kesehatan reguler akan mengalami peningkatan dari Rp133 triliun tahun ini ke Rp168,4 triliun yang ditujukan untuk memperkuat sistim kesehatan di Indonesia, dikutip dari Kompas.com, Senin (8/8/2022).

Selain perbaikan kualitas kapital manusia melalui pendidikan dan kesehatan, untuk bisa menunjang investasi Sumber Daya Manusia tergantung pada tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur. Infrastruktur menjadi pendorong primer dalam perekonomian yang memiliki fungsi penting untuk memudahkan proses produksi dan mengembangkan penyaluran. Hal ini didukung oleh penuturan Ikhsan dalam (Wahyuni, 2009) yang mengatakan bahwa jika dilihat secara langsung pengembangan infrastruktur itu sendiri merupakan kegiatan efektif yang bertujuan untuk menghasilkan dan menciptakan lapangan kerja. Secara tidak langsung

dijelaskan bahwa keberadaan infrastruktur bisa memberikan pengaruh terhadap pembangunan perekonomian sehingga produktivitas dapat tumbuh. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur perlu menjadi perhatian guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat turut meningkat serta menekan angka kemiskinan.

Pengembangan prasarana memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu upaya yang cukup efektif untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu melalui pembangunan infrastruktur. Hal ini juga dikemukakan oleh Menurut Rofiq dalam (Pasaribu, 2016) Pembangunan infrastruktur adalah bidang prioritas yang perlu mendapat perhatian untuk mengentaskan kemiskinan. Pembangunan infrastuktur dasar seperti penyediaan listrik, penyediaan air bersih, sanitasi, irigaasi, pembangunan jalan dan jembatan yang terelialisasi dengan dapat meningkatkan pembangunan. Sedangkan kondisi infrastruktur yang kurang dan minim di suatu negara dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Salah satu contoh penyediaan infrastruktur yang cukup penting dalam menunjang kehidupan masyarakat yaitu dalam bentuk perumahan dan transportasi. Pemerintah menyediakan perumahan dan transportasi untuk memenuhi keperluan masyarakat. Ketersediaan rumah layak huni bisa menunjang kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas potensi. Pada saat yang sama, transportasi yang baik akan bisa memperlancar penyaluran kegiatan perekonomian dan dalam jangka panjang kedepannya nanti bisa sebagai alat pemerataan pembangunan.

Berdasarkan pendapat Deni Friawan (2008) terdapat tiga dasar pokok pentingnya infrastruktur dalam menunjang pembangunan ekonomi. Yang pertama, tersedianya infrastruktur sebagai mesin penggerak utama dalam pengembangan

ekonomi. Kemudian yang kedua, agar bisa memperoleh manfaat dari integrasi karena dengan tersedianya jaringan fasilitas infrastruktur bisa memperlancar kegiatan perdagangan dan juga investasi. Yang terakhir, pentingnya perbaikan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pengembangan ekonomi antar negara. Fasilitas infrastruktur yang cukup penting dalam menunjang kehidupan penduduk diantaranya adalah dalam bentuk perumahan dan juga transportasi. Di beberapa negara berkembang banyak memanfaatkan pengeluaran Pemerintahan dipergunakan unruk investasi pada sarana prasarana fasilitas infrastruktur dengan porsi yang cukup besar untuk bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

**Gambar 1.4. Anggaran Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2019 – 2023**



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Bisa dilihat pada grafik diatas bahwa pada tahun 2023 dalam Rancangan Anggaran Penghasilan dan Belanja Ngera (RAPBN) Pemerintahan menganggarkan sebanyak Rp392 triliun pada sektor infrastruktur. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,8% apabila disejajarkan dengan tahun sebelumnya sebelumnya sebanyak Rp363,8 triliun. Adanya peningkatan alokasi dana pada tahun 2023

rencananya dipakai untuk mengembangkan belanja keperluan fasilitas infrastruktur guna menunjang transformasi perekonomian. Sebagian besar alokasi – alokasi dana ini akan didistribusikan melewati belanja Pemerintahan pusat serta tunjangan kinerja daerah (TKD). Dengan alokasi dana tersebut, Pemerintahan merencanakan pengembangan berbagai layanan dasar, termasuk 3.511 rumah susun, serta pengembangan rehabilitasi, atau renovasi infrastruktur, termasuk 670 pendidikan dasar hingga menengah.

Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945 telah ditetapkan terkait alokasi dana Pemerintahan bidang pendidikan sebanyak 20 persen. Dimana pada tahun 2022 Pemerintahan mengalokasikan dana pada bidang pendidikan sebanyak Rp480,3 triliun rupiah. Selain alokasi dana untuk pendidikan, pengeluaran Pemerintahan juga dianggarkan untuk bidang kesehatan sebanyak Rp188,1 triliun rupiah. Alokasi alokasi dana bidang kesehatan tersebut sesuai ketentuan UU Pasal 171 Ayat 2 No. 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan yang dijelaskan bahwa alokasi pengeluaran Pemerintahan sebanyak 5 persen dari APBN dan paling sedikit sebanyak 10 persen dari APBD. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, Pemerintahan mengarahkan penggunaan minimal 25 persen Dana Transfer Umum (DTU) alokasi dana Pemerintahan dipergunakan untuk prasarana. Pemerintahan mengalokasikan dana sebanyak Rp365,5 triliun rupiah untuk alokasi dana infrastruktur dalam APBN. Dari ketiga bidang tersebut, bisa diidentifikasi bahwa Pemerintahan mengalokasikan alokasi dana paling besar pada sektor pendidikan, kemudian sektor infrastuktur dan terkecil sektor kesehatan.

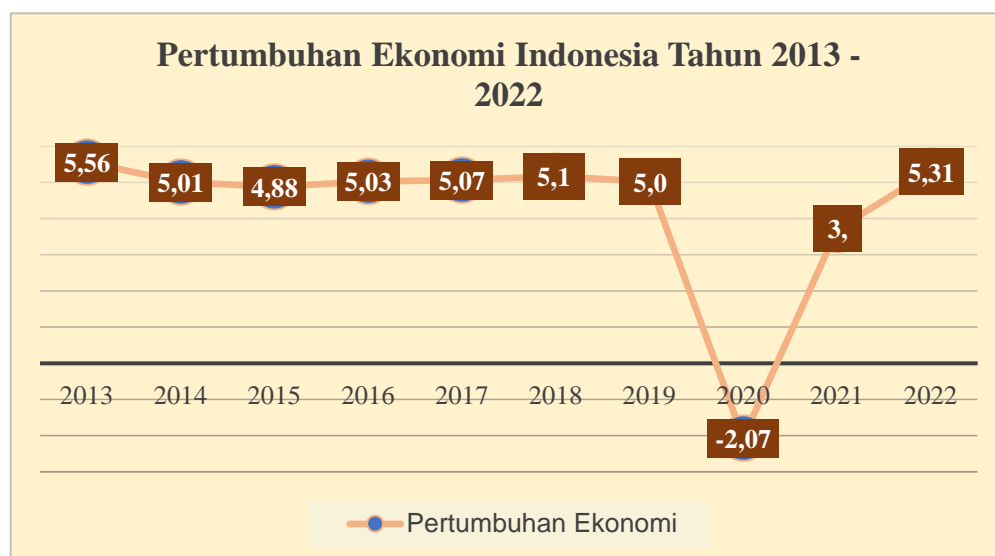
Sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi, yang sering dianggap sebagai indikator primer

keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi penduduk, yang paling pokok dalam hal peningkatan produksi barang jasa atau meningkatkan PDB setiap tahunnya. Dalam konteks makroekonomi, pertumbuhan ekonomi bisa dimaknai sebagai peningkatan PDB, yang juga berarti peningkatan penghasilan nasional (Tambunan, 2001). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dipakai sebagai alat untuk mengukur perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah, sehingga bisa menentukan arah pengembangan di masa depan guna menciptakan kesejahteraan penduduk. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tidak bisa memberikan jawaban secara impulsif terhadap berbagai permasalahan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi masih merupakan elemen penting dari setiap kebijakan pembangunan yang berguna dalam mengentaskan kemiskinan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Adapun tujuan pokok dari upaya pengembangan ekonomi selain menghasilkan kemajuan yang tinggi juga harus bisa mengurangi atau mengentaskan kemiskinan, ketimpangan penghasilan dan pengangguran (Todaro dalam Rahayu, 2021). Ketika suatu negara mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kemiskinan semakin berkurang karena kesempatan kerja juga turut meningkat sehingga jumlah pengangguran akan berkurang dan menurunkan angka kemiskinan seperti yang dialami negara – negara maju. Sementara pengembangan bidang non-ekonomi bisa berupa pengembangan manusia guna terciptanya penduduk yang berpendidikan, memiliki kesehatan dan kehidupan yang layak. Pada hakikatnya, pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kegiatan perekonomian suatu penduduk sebagai tolak ukur dalam

keberhasilan pembangunan dan menjadi suatu kriteria sebuah keharusan (*necessary condition*) bagi pengentasan kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kuat masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan terkait kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintahan sebagai penstabil perekonomian perlu menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

**Gambar 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013 – 2022**



Sumber : BPS Indonesia, diolah

Dari grafik tersebut diketahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2022 memperoleh hasil yang fluktuatif. Mulai tahun 2013 hingga 2015 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami degradasi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mencapai sebanyak 5,56% kemudian menurun tahun 2014 menjadi 5,01% dan pada tahun 2015 terus terjadi degradasi hingga pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,88%. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang awalnya 4,88% menjadi 5,03%. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dua tahun kemudian yaitu tahun 2017 mencapai 5,07% kemudian meningkat mencapai 5,17% di tahun 2018. Namun, ditahun 2019

menurun dari tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02% dan merosot tajam pada tahun 2020 hingga mencapai -2,07%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menyentuh angka negatif akibat pandemi covid-19 hingga ada pembatasan sosial mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi terbatas.

Meskipun sempat menyentuh angka negatif pada tahun 2020 akibat corona, namun perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanan dan terus mengalami pemulihan. Untuk menghadapi permasalahan ini, Pemerintahan tidak tinggal diam, namun terus menerapkan berbagai upaya dan strategi, termasuk kebijakan Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN). Kebijakan ini dianggap mampu mendorong laju ekonomi nasional sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mampu mengalami peningkatan hingga mencapai 3,70%. Tidak hanya sampai disitu saja, di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi juga turut mengalami peningkatan hingga mencapai angka 5,31%. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 juga didorong oleh adanya peningkatan persentase ekspor sebanyak 14,93% dan impor sebanyak 6,25% kenaikan impor barang kapital dan bahan baku.

Pengeluaran Pemerintahan merupakan salah satu kebijakan Pemerintahan yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menurunkan angka kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi juga berfungsi menurunkan tingkat kemiskinan. Dari beberapa uraian diatas, penelitian ini mengkaji terkait dampak pengeluaran Pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Dengan demikian, dalam penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintahan



pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur serta Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari gambaran umum diatas, maka muncul pertanyaan dalam penelitian yang bisa dikemukakan diantaranya yaitu:

1. Apakah pengeluaran Pemerintahan sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia?
2. Apakah pengeluaran Pemerintahan sektor kesehatan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia?
3. Apakah pengeluaran Pemerintahan sektor infrastruktur memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran Pemerintahan sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran Pemerintahan sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran Pemerintahan sektor infrastruktur terhadap kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup digunakan agar semakin jelas arah penelitian dan memiliki batasan serta mengetahui seberapa besar permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian ini untuk mengetahui dampak pengeluaran Pemerintahan pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dari BPS dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun variabel yang dipakai yaitu pengeluaran Pemerintahan pusat sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas dan kemiskinan di Indonesia sebagai variabel terikat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu bentuk implementasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dengan adanya penelitian bisa menambah wawasan baru yang belum diperoleh selama kuliah.
2. Bagi universitas, penelitian ini bisa menjadi referensi diperpustakaan untuk dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis terkait.
3. Bagi Pemerintahan, penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menjadi masukan dan rekomendasi dalam membuat kebijakan mengenai materi terkait.